BAB II

KAJIAN TEORI

A. Madrasah

Madrasah berasal dari akar kata *darrasa,* yaitu belajar, sedangkan madrasah berarti tempat belajar atau sekolah formal. Madrasah menurut orang awam adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan agama Islam saja, perpaduan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, maupun ilmu berbasis ajaran Islam.[16]

Madrasah Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan struktur dan mekanisme yang hampir sama, dan sekilas madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah dengan muatan dan corak keislaman.[17]

Kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam baik di Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan.[18]

Munculnya gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang

---

[16] Abudin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 20-21), h.204.

[17] IP Simanjuntak, *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972/1973), h. 24.

[18] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 1990-1942, (Jakarta, LP3ES, 1995), h. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompleks. Terdapat empat faktor pendorong gerakan pembaharuan ini, antara lain:[19]

1. Faktor keinginan untuk kembali pada al qur'an dan hadis
2. Faktor semangat nasionalisme melawan penjajah
3. Faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, politik dan budaya
4. Faktor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia

Gerakan tersebut tidak secara terpadu mendorong gerakan pembaharuan pendidikan Islam, melainkan gerakan tersebut muncul disebabkan salah satu atau dua faktor tersebut. Dan setiap gerakan tersebut memiliki alasan dan motif yang berbeda.

Perkembangan madrasah merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Madrasah merupakan lembaga persekolahan ala Belanda dengan muatan keagamaan. Pengembangan tradisi pendidikan rakyat Indonesia pada masa itu diusulkan untuk dimanfaatkan oleh Belanda. Namun secara teknis usulan tersebut sulit terpenuhi karena tradisi pendidikan Islam masih dipandang memiliki kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pembelajarannya.[20]

Untuk memperbarui pendidikan Islam beberapa tokoh menempuh pendidikan Islam tradisional dan sekolah umum ala Belanda. Mereka mengkombinasikan pelajaran keagamaan dengan pelajaran membaca, menulis

[19] Pada penelitiannya Steenbrink mengidentifikasi pada rentang waktu 1990 sampai 1945. Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta, LP3ES, 1994), h. 26-29

[20] S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Jemmars, 1983), h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan kebudayaan, dan keterampilan organisasi. Metode pengajarannya pun disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat.[21]

Ciri madrasah pada masa ini masih bersifat pribadi dan merupakan organisasi yang masih sempit. Tidak ada pengaturan yang bersifat umum dan mengikat mengenai bentuk kelembagaan, struktur, managemen, dan kurikulumnya. Usaha pendirian madrasah bertujuan untuk meningkatkan peran umat Islam.

Kebijakan yang kurang menguntungkan berlanjut pada masa penjajahan Jepang yang menghapuskan sekolah berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia digunakan lebih luas di lingkungan pendidikan, kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah.[22] Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah namun tetap mewaspadai madrasah karena berpotensi untuk melawan kedudukan Jepang di Indonesia.

Atas dibukanya madrasah pada masa ini, kalangan ulama Minangkabau mengusulkan membentuk Majelis Islam Tinggi yang mengkordinasikan pendidikan agama di sekolah maupun madrasah. dan pemerintahan Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius pada usulan ini.

---

[21] Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 96.
[22] Lee Kam Hang, *Education and Politics Indonesia 1945-1965*, (Kuala Lumpur: University of Malay Press, 1995), h. 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis ini menjadi penggagas munculnya pendidikan Islam *awaliyah* di usia minimal 7 tahun. Program pendidikan *awaliyah* ini dilakukan sore hari untuk menyeimbangkan anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah rakyat di pagi hari.

Masa orde lama merupakan proses dasar pembaharuan kelahiran madrasah formal. Di masa sebelumnya kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap madrasah bersifat menekan, dikarenakan kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslim terpelajar. Bagi pemerintahan penjajah, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis kultural, namun juga bersifat psikologi politik.[23]

Masa itu erat kaitannya dengan peran Departemen Agama yang diresmikan pada 3 Januari 1946. Lembaga ini memperjuangkan politik pendidikan Islam Indonesia. Bagian pendidikan pada Departemen ini memiliki tugas yang meliputi: (1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan swasta, (2) Memberi pengetahuan umum di madrasah, (3) Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan hakim Islam negeri (PHIN)

Departemen Agama mengurusi pengajaran agama di sekolah negeri swasta dan pengajaran umum di madrasah, penyelenggaraan Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Pendididkan Hakim Islam Negeri (PHIN). Departemen ini

[23] Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaungi madrasah di luar sistem pendidikan nasional yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[24]

Memasuki masa orde baru dipandang madrasah harus ditingkatkan dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan agama dilaksanakan sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional yang tidak terpisahkan.

Di tahun 1970-an, masyarakat Islam keberatan dengan penyelenggaraan madrasah di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pemerintah melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus menerus berkaitan dengan Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam madrasah.

Pemerintah pun mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Kepres No. 34 dan Impres No. 15 Tahun 1974 yang isinya: (1) Pembinaan Pendidikan umum adalah tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan, sedangkan tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab menteri agama, (2) Untuk pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan impress No. 15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P & K, departemen dalam Negeri dan Departemen Agama.

[24] Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* …, h. 127-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, disusul adanya penyusunan (Surat Keputusan Bersama) SKB 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975,[25] dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal 1, ayat (2) misalnya dinyatakan Madrasah itu meliputi 3 Tingkatan: (a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, (b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Bab II pasal 2 disebutkan bahwa: (a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum setingkat, (b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas, (c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah Umum yang setingkat.

Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam bab IV pasal 4 sebagai berikut: (a) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (b) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (c) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama dan Meteri dalam Negeri[26]

Untuk kurikulum madrasah 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum madrasah 1976. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

---

[25] Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, (Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam: 2005), h. 64.

[26] A. Aziz Martunus, *Laporan lokakarya Pelaksanaan SKB 3 Menteri*, (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1978/1979).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah disebutkan penyusunan Kurikulum Madrasah 1984 berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 0299/U/1984 dengan Menteri Agama (Menag) No. 045/1984 tentang "Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah", yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi.

Madrasah mengalami pengintegrasian saat lahirnya UUSPN No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup ketentuan semua jalur dan jenis pendidikan. Baik jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.[27]

UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1945. Undang-undang berisi penegasan definitif tentang madrasah yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan.[28]

Dengan berlakunya UUSPN nomor 2 tahun 1989 beserta perangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka pendidikan di madrasah banyak mengacu pada sistem pendidikan nasional, baik menyangkut satuan dan

[27] Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994)
[28] Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* …, h. 131-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang pendidikan maupun kurikulum pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada pasal 37 UU No. 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa :

> "Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan, memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan".

Sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, madrasah harus menerapkan kurikulum nasional 1994 yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut madrasah pada dasarnya sepadan dengan sekolah umum dengan sedikit perbedaan, yaitu madrasah memberikan penekanan khusus pada mata pelajaran agama Islam.

Selain itu Departemen Agama dengan bantuan para ahli pendidikan Islam berupaya memasukkan apa yang mereka sebut "nuansa Islam" dalam menulis buku-buku teks berkenaan dengan masing-masing mata pelajaran dalam kurikulum madrasah 1994.

Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat lokal. Kurikulum lokal ini pada dasarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan berlaku dalam SK Menteri Agama RI Nomor 371, 372, 373 tahun 1993 tentang kurikulum MI, MTs dan MA sebagai berikut:

> "Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Madrasah juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat".

Pada kurikulum 1994 guru diberi wewenang untuk improvisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Guru leluasa mengatur alokasi waktu dalam mengajarkan setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan kebutuhan. Guru diberi wewenang dalam menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuihan sehingga peserta didik aktif dalam pembelajaran, baik secara fisik dan mental (intelektual dan emosional) maupun sosial.

Perjuangan memasukkan pengajaran agama dalam sistem pendidikan nasional berhasil setelah diundangkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang disahkan presiden pada Tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang ini mengakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, dan khusus.[29]

Pada undang-undang sisdiknas 2003, madrasah sudah bisa memilah diri menjadi tiga pola yaitu:

1. Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. pelajaran umum tidak semua harus diajarkan tiap tatap muka, demikian juga pelajaran agama. Yang diajarkan hanya yang esensial saja. Dengan demikian anak didik dapat lebih berkonsentrasi kepada pelajaran utama sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mengusai pengetahuan umum dan sebagai muslim yang baik.

[29] Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, …, h. 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, di mana fokus utama adalah pelajaran agama. Pelajaran umum hanya sebagai penunjang saja. Dalam hal ini harus diberikan kebhinekaan program antara madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan, Namun standard umum harus sama dengan sekolah dan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas. Menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan agama dengan baik, namun memahami dasar ilmu dan teknologi sebagai pelengkap kehidupan.
3. Madrasah sebagai sekolah kejuruan, dimana fokus pelajaran pada ketrampilan hidup *(life skill)* namun sebagai muslim yang baik. Pola pendidikan mengikuti pola sekolah umum kejuruan dengan prinsip seperti pola madrasah.

B. Klasifikasi Madrasah

Seiring perkembangan pendidikan, Madrasah senantiasa meningkatkan kualitas dengan memiliki keunggulan dan memadukan pengajaran pendidikan, serta moralitas luhur. Pengajaran bahasa asing (Arab-Inggris), ilmu umum dan agama yang dikaji dan dikembangkan secara inovatif.[30]

Madrasah yang 100% mengajarkan materi agama disebut dengan Madrasah Diniyah. Madrasah ini biasanya berdiri di lingkungan pesantren salaf. Sedangkan madrasah yang mengajarkan materi umum merupakan madrasah formal yang ijazahnya diakui oleh Negara dan bisa digunakan

[30] Nanang Fathurrohman, *Pendidikan Madrasah Berbasis Enterpreneuship*, (Depok, Lentera Hati Pustaka, 2012), h. 37-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.[31] Madrasah ini seperti halnya sekolah pada umumnya yang terstruktur dan terorganisasi seperti lembaga pendidikan pada umumnya namun dengan muatan pendidikan agama yang lebih banyak.

Madrasah formal, sama halnya seperti sekolah umumnya yang dibagi menjadi beberapa jenjang pendidikan, yaitu:

1. RA *(Roudhotul Athfal)*

   Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak pra sekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam untuk anak berusia empat sampai enam tahun.[32] RA merupakan jalur pendidikan formal yang setingkat dengan Taman Kanak-kanak (TK).[33]

   Pada jenjang ini siswa diajak untuk belajar sambil bermain. Memahami bentuk, warna, bermain, bernyanyi, menari, membuat ketrampilan, menulis dan membaca, serta menggambar maupun mewarnai.

---

[31]Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 19-20.

[32]Departemen Agama Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudhatul Athfal*, (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 4.

[33] Zainal Aqib, *Belajar dan Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), h. 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. MI *(Madrasah Ibtida'iyah)*

MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini setara dengan Sekolah Dasar (SD) yang wajib ditempuh oleh seluruh anak-anak Indonesia.[34] MI merupakan jenjang lanjutan setelah RA.

Pada jenjang *madrasah ibtida'iyah* ini siswa menerima pelajaran seperti halnya sekolah umum dengan tambahan pelajaran agama seperti FIQIH, Aqidah Akhlaq, alQur'an Hadits dan juga Bahasa Arab. Untuk pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam baru diberikan mulai kelas 3.

Beberapa MI juga mewajibkan adanya tadarus alQur'an bagi siswanya dengan panduan dari guru al qur'an. Juga doa bersama maupun pembacaan *asma'ul husna* sebelum pelajaran dimulai ataupun hafalan surat-surat pendek sesuai dengan jenjang siswa.

3. *MTs (Madrasah Tsanawiyah)*

MTs adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.

[34] Kementrian Agama RI, *Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2015), h. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MTs dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti: Quran dan Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.[35]

4. MA *(Madrasah Aliyah)*

Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.

Aliyah adalah jenjang yang paling tinggi di madrasah. Pada tahun kedua (yakni kelas 11), seperti halnya siswa SMA, maka siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa.

[35] Kementrian Agama RI, *Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku*, …, h. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang akan menentukan kelulusan siswa. Lulusan madrasah Aliyah dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama Islam, atau langsung bekerja. MA sebagaimana SMA, ada MA umum yang sering dinamakan MA dan MA Kejuruan (di SMA disebut SMK) misalnya Madrasah aliyah Kejuruan (MAK) dan madrasah aliyah program keterampilan.

C. Madrasah Negeri, Swasta dan Madrasah Pesantren

1. Madrasah Negeri

Madrasah negeri adalah madrasah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Negara. Madrasah negeri memiliki pandangan yang baik dan bagus di kalangan masyarakat. Masyarakat umumnya memandang bahwa madrasah negeri lebih unggul dari madrasah swasta, baik dari segi fasilitas maupun kualitas.[36]

Madrasah negeri awalnya merupakan upaya Departemen Agama dalam menata dan membina madrasah. Dengan cara perubahan status menjadi negeri pada sejumlah madrasah swasta dan menjadikannya sebagai *pilot project.* Madrasah negeri dijadikan contoh bagi sekolah

[36] Rusni Bil Makruf, "Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah Swasta", el Hikmah Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan Islam, 10. 1, (6. 2016), h. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

swasta agar menjadi madrasah bermutu dan profesional. Pendirian madrasah negeri merupakan pembinaan terhadap madrasah swasta.[37]

Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1946 Tanggal 19 Desember 1946 tentang pemberian bantuan madrasah sebagai gambaran bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren setelah Indonesia merdeka. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa madrasah adalah tempat pendidikan dengan pokok pengajaran berupa ilmu pengetahuan agama islam. Dicantumkan pula madrasah hendaknya mengajarkan ilmu pengetahuan umum lainnya.[38]

Jumlah pengetahuan umum sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah jam pengajaran seluruhnya. Hal ini disarankan oleh panitia penyelidik pengajaran yang mengamati bahwa mayoritas madrasah jarang mengajarkan pengetahuan umum yang juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Kehadiran madrasah negeri setelah kemerdekaan Indonesia sesuai dengan keputusan BKNIP tanggal 2 Juli 1946 bahwa pemerintah harus membantu dan mendorong lembaga pendidikan agama Islam yang telah ada agar berkualitas. Dilakukan perubahan status menjaddi negeri beberapa madrasah sebagai percontohan untuk mendukung madrasah swasta untuk menjadi lebih baik dan berkualitas.[39]

---

[37] Minnah el Widdah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, …, h.31.

[38] Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1946 Tanggal 19 Desember 1946 Tentang Pemberian Bantuan Madrasah.

[39] Asep Suryana, *Pengembangan Mutu Madrasah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah negeri pelaksanaannya diawasi langsung oleh kementrian agama, karena bertujuan sebagai contoh bagi madrasah swasta SDM dari pengajar maupun karyawan dari madrasah ini pun diseleksi sedemikian untuk menjaga kualitas madrasah.[40] Selain pengajar dan karyawan, untuk siswa juga mengalami seleksi sedemikian rupa untuk dapat masuk di sekolah negeri. Sehingga input pembelajar dari madrasah negeri pun bukan hanya sekedar memenuhi kuota, namun juga input yang berkualitas.

Kurikulum dan administrasi madrasah negeri lebih terstruktur, rapi dan tertata. Mulai dari pendataan dan segala yang berkaitan dengan proses pembelajaran, perangkat, pengelolaan waktu dan penerapan di supervisi dan diawasi langsung oleh pihak pengawas madrasah. Sehingga pelaksanaan administrasi dan proses belajar mengajar pun lebih tertata sehingga menghasilkan output yang berkualitas pula.

Fasilitas sarana dan prasarana mulai dari gedung bangunan serta perlengkapan operasional dan kebutuhan dari madrasah negeri diberi anggaran tersendiri oleh pemerintah demi terealisasinya madrasah yang memiliki mutu yang tinggi. Mengingat madrasah negeri adalah proyek percontohan bagi madrasah swasta lainnya.[41]

[4040] Minnah el Widdah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, …, h. 31-32.

[41] Asep Suryana, *Pengembangan Mutu Madrasah*, …, h.33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Madrasah Swasta

Madrasah Swasta adalah madrasah yang pengadaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan dikelola oleh lembaga perorangan atau kelompok masyarakat.[42]

Madrasah swasta lahir dari kehendak rakyat, dikelola sendiri oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Madrasah swasta memiliki ciri ketulusan pada guru dan karyawannya dengan tujuan menagakkan agama Allah. Namun tidak diimbangi dengan keahlian, ketrampilan yang memadai. Sehingga SDM dari madrasah swasta ini seringkali dianggap rendah.

Bukan hanya dari pengajar dan karyawannya saja, melainkan dari input siswa yang menjadi pembelajar di madrasah swasta ini sering kali hanya untuk memenuhi kuota yang ada atau juga semua diterima tanpa seleksi untuk menunjukkan eksistensi madrasah swasta yang memiliki siswa yang banyak.

Kurikulum administrasi dan proses pembelajaran pada madrasah ini lebih sederhana dan tidak jarang juga perangkat pembelajaran hanya sekedar memenuhi untuk akreditasi atau pendataan sekolah namun tanpa dilaksanakan. Pendataan dan pengelolaan sekolah madrasah swasta terkadang dianggap tidak penting. Sehingga proses pembelajaran pun terkesan asal dan hanya memenuhi jam pelajaran saja. Sehingga proses pemelajaran pun sering kali dianggap kuran berkualitas.

[42] Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigma Baru, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah swasta identik dengan fasilitas yang serba kurang. Beberapa sekolah swasta dirintis dengan menempati rumah pendirinya, kemudian menerima tanah wakaf, mendapat sumbangan dari masyarakat untuk membangun gedung dan akhirnya terwujud bangunan sederhana. Untuk mewujudkan kondisi ideal suatu madrasah membutuhkan perjuangan yang keras dengan bantuan dari masryarakat sekitar dan juga pengabdian dari guru dan karyawan.

Bagi madrasah swasta, Bantuan Operasional Sekolah merupakan catatan bersejarah. Pengelolaan madrasah swasta selama ini dilakukan secara mandiri. Madrasah swasta sudah terbiasa mencukupi kebutuhan operasional pendidikan dengan mencari dana sendiri. Jangankan berpikir mengembangkan program peningkatan mutu, untuk membayar rutin honor guru pun, kerap harus menunggak.[43]

3. Madrasah Pondok Pesantren

Madrasah Pondok pesantren sering kali disebut sebagai pesantren khalafi, yaitu pesantren yang selain mengajarkan pengajaran kitab Islam klasik juga membuka sistem sekolah umum dilingkungan dan dibawah tanggung jawab pesantren atau berada dalam satu kelembagaan.

[43]Rusni Bil Makruf, "Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah Swasta", el Hikmah Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan Islam, 10. 1, (6. 2016), h. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pesantren yang tidak mengajarkan pengetahuan umun disebut pesantren salafi, yaitu pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Sistem madrasah diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode sorogan.[44]

Pesantren terkadang memiliki pamor yang lebih tinggi dari pada madrasah, hal ini dikarenakan banyak guru pesantren yang menjadi ulama besar. Pondok pesantren yang menghasilkan seorang ulama besar menjadi jaminan kualitas berdasarkan pandangan masyarakat. Tujuan pendidikannya bukan hanya menambah pengetahuan santri, melainkan untuk meningkatkan semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan perilaku jujur.[45]

Tujuan lain dari madrasah pesantren adalah tujuan kemasyarakatan dan tujuan ibadah dalam mencari ilmu.[46] Tujuan kemasyarakatan disini tercermin dalam kehidupan keseharian santri di pesantren. Segala tindakan dan pelajaran serta gerak-gerik yang dilakukan dalam pesantren akan dialami santri di masyarakat kelak.

Pesantren seperti halnya miniatur masyarakat dan pesantren di sini memiliki peran untuk menanamkan pembentukan karakter diri serta mental mandiri, percaya diri, mudah beradaptasi, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

---

[44]Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h.194.

[45] Zamakhsari Dhofier, *Kepemimpinan Dalam pesantren Mandar Maju Jaya*, (1992), h. 21.

[46] Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, …, h. 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan ibadah dan mencari ilmu merupakan tujuan menanamkan keyakinan untuk menuntut ilmu dengan niat ibadah memenuhi perintah Allah untuk menjadi generasi beriman dan bertakwa serta haus ilmu *(mu'min, muttaqin, wa rosikhina fil 'ilmi)*.

Ciri-ciri yang dominan dalam pendidikan pesantren adalah latihan kemandirian, *life skill,* dan hanya kepada Allah menggantungkan diri dan berserah diri. Para Kiai di pesantren sangat menaruh perhatian kepada pengembangan watak individu sesuai dengan karakteristik potensi yang dimiliki. Santri yang cerdas dalam membaca al Qur'an akan dibedakan porsi belajarnya dibandingkan dengan santri yang cerdas dalam bidang logika.[47]

Pondok merupakan ciri khas dari pesantren. Besarnya pondok tergantung dari aset pesantren, pondok dianggap kecil jika menampung kurang lebih 200 santri, sedang jika menampung 250-700 santri, dan pondok besar yang menampung lebih dari 700 santri.[48]

Sistem akademik madrasah pondok pesantren terbagi atas dua jalur, yaitu jalur ajar dan jalur asuh. Jalur ajar merujuk pada jalur pendidikan yang fokus pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas intelektual santri.[49]

---

[47] Minnah el widah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, …, h. 10.
[48] Minnah el widah, *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*, …, h. 11-12.
[49] Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, …, h. 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara jalur asuh menitik beratkan pada pengawasan kehidupan santri di lingkungan asrama selama 24 jam. Agenda dan program yang disediakan oleh madrasah pondok pesantren ditujukan untuk mengadakan perwalian dan pengasuhan terhadap santri dalam berbagai aspek, mulai dari etika (akhlaqul karimah), kepribadian, sikap dan perilaku.

Kurikulum pondok pesantren memadukan bidang studi umum (Kurikulum dari Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama) dan kurikulum bidang studi agama (Kurikulum Pesantren) dalam satu sistem terpadu. Beberapa pondok pesantren juga menyelenggarakan kurikulum yang terbagi menjadi tiga. Yaitu kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.[50]

Kurikulum intrakurikuler merupakan proses belajar dan mengajar yang dilakukan dalam bentuk in *class session program*. Pada proses ini tenaga pengajar terlibat secara langsung dengan sistem klasikal, secara umum muatan materi yang diberikan berupa pelajaran yang mengkolaborasikan antara kurikulum pesantren, dan kurikulum umum (Kurikulum Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama). Kurikulum kokurikuler merupakan kegiatan tambahan santri (muatan lokal) yang wajib diikuti, meski tidak harus berada di dalam kelas.

[50]Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, …, h. 168-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut beberapa kokurikuler yang ada dalam madrasan pesantren:

a. Kajian kitab-kitab *salafiyah*
b. Disiplin dalam penggunaan Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. (ada pula yang dijadwal)
c. Latihan pidato dalam tiga bahasa *(muhadlaroh)*
d. Pembinaan membaca al Qur'an
e. *Tahfidzul Qur'an* (hafalan beberapa surat tertentu)
f. Disiplin dalam melakukan ritual *'ubudiyah*
g. Kepramukaan
h. Keorganisasian santri untuk pendidikan manajemen kepemimpinan *(leadership).*

Kurikulum Ekstrakurikuler adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk *off class session* yang melibatkan guru dan juga pelatih. Kegiatan ini merupakan penyaluran dan pengembangan minat serta bakat santri dalam berbagai bidang. Santri bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler mereka tanpa mengesampingkan tugas utamanya. Berikut beberapa ekstrakurikuler yang ada dalam madrasah pesantren:

a. Diskusi dan kegiatan ilmiah
b. Pengembangan olahraga
c. Pengembangan seni musik (Band Religi, Qosidah, Hadrah, Banjari, *Marching Band*, Marawis, Nasyid, Paduan Suara, dll)
d. Pengembangan seni bela diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Tahsinul Qur'an*

f. *Tahfizul Qur'an*

g. Pengembangan Jurnalistik

h. Pengembangan teater dan pentas seni

D. Manajemen Madrasah

Manajemen adalah yang menentukan sukses tidaknya suatu lembaga. Jika manajemen berjalan dengan baik dan professional, maka lembaga akan berjalan dengan stabil dan dinamis. Sebaliknya, jika manajemen tidak berjalan baik, maka lembaga akan berjalan tanpa arah, target, dan strategi.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya menerapkan manajemen yang berasaskan nilai kebenaran, kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, integritas, dan kredibilitas sebagaimana di contohkan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabatnya yang berkomitmen besar terhadap nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.[51]

Berikut Manajemen yang di kelola dalam madrasah:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada manajemen ini meliputi penempatan personel dalam struktur, *job description* (pembagian tugas), jalur instruksi dan kordinasi, pola interaksi serta komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi dan lain-lain.

[51] Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, …, h. 85-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen SDM harus dilakukann secara terbuka dan konsisten. Pengembangan kompetensi dilakukan secara kontinu, reward dan punishment diberikan secara proporsional. Menggunakan asas organisasi dan asas kekeluargaan. Relasi pemimpin dan bawahan bersifat *buttom-up* (dari bawah ke atas). Mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, adanya ruang idea-sharing (berbagi gagasan) secara demokratis dan egaliter sehingga ada rasa memiliki bersama dalam organisasi.

2. **Manajemen Kurikulum**

Secara tradisional kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Dan secara modern kurikulum merupakan sumber, kegiatan, dan pengalaman yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, baik dari dalam kelas maupun di luar kelas.[52]

Setiap saat kurikulum bisa berubah sesuai dengan dinamika zaman. Oleh karena itu manajemen harus dinamis, responsive, dan antisipatif. Pengelolaan harus dilakukan dengan professional dengan menempatkan personel-personel berkualitas tinggi agar bisa merespon dan mengantisipasi perubahan yang terus terjadi.

3. **Manajemen Kesiswaan**

Siswa adalah subjek pendidikan yang memiliki aspirasi, gagasan, dan ide serta pemikiran yang harus didengar dan dijadikan rujukan dalam

[52] Omar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, cet. 3, (Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keputusan. Bakat, minat, dan keahlian yang dimiliki peserta didik juga harus digali dan dikembangkan. Siswa memerluka bimbingan intensif dalam mengatasi masalah pribadi, kelompok, memetakan *skills*, dan merencanakan masa depan dengan baik.

Staf yang menangani bidang kesiswaan haruslah sosok yang dekat secara psikologis dengan siswa, sosok yang santun, tidak mudah marah, sabar menghadapi kenalakan siswa, dan berusaha memberikan solusi terbaik dari problem yang ada. Menguasai teknik bimbingan konseling, cerdas membaca bakat siswa dan mambantu siswa untuk menyalurkan bakat tersebut pada tempat yang sesuai.

Tata tertib madrasah diterapkan secara disiplin tanpa adanya diskriminasi. Semua siswa dipandang sama, tidak ada hak istimewa. Pendekatan yang digunakan dengan cara persuasif agar terbangun kedekatan psikologis dengan siswa.

Pengkondusifan suasana madrassah agar siswa mampu mengembangkan bakat dengan memberikan sarana dan forum-forum yang mendorong lahir dan berkembangnya potensi siswa. suasana madrasah yang nyaman, indah, asri dan menyenangkan sangat membantu siswa untuk menggali dan mengembangkan bakatnya.

Manajemen kesiswaan ini dibagi menjadi banyak hal mullai dari penerimaan siswa baru, orientasi siswa, kehadiran dan ketidakhadiran siswa, pengelompokan siswa, evaluasi hasil belajar mengajar, sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat dan tanpa tingkat, mengatur siswa yang mutasi dan drop out, kode etik, pengadilan, serta hukuman dan kedisiplinan siswa.[53]

4. **Manajemen Keuangan**

Madrasah harus memiliki manajemen keuangan yang transparan, akuntabel dan kredible. Bendahara sebagai actor utama aspek keuangan harus merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi dan tidak mentolereansi adanya korupsi, manipulasi dan segala jenis penyimpangan. Memiliki semangat belajar yang tinggi karena tuntutan profesionalitas yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer lembaga pendidikan dalam konteks keuangan, yaitu:

a. Anggaran harus benar-benar digunakan sesuai dengan program yang direncanakan.
b. Efisiensi anggaran dilakukan untuk menghindari adanya pembelian atau pengadaan barang
c. Membuang jauh kesan penggunaan uang untuk menghabiskan dana, karena penghematan merupakan unsur penting dari manajemen keuangan.
d. Yang berhak mengeluarkan uang adalah petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.[54]

---

[53] Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 93.
[54] M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul*, (Tinjauan Umum dan islami), (Lombok: Holistica, 2012), h. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen keuangan berkaitan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan aturan main, aktif dalam menggali dana dan menyalurkan dana sesuai prosedur, serta dilengkapi dengan laporan rutin mingguan, bulanan, tengah semester, satu semester dan tahunan. Evaluasi dilakukan secara kontinu untuk mengetahui tingkat akuntabilitas aspek keuangan sehingga tidak ada celah untuk melakukan penyimpangan keuangan.

5. **Manajemen Administrasi**

Administrasi atau tata usaha memiliki kegiatan sebagai berikut:

a. Menghimpun, yaitu mencari, mengumpulkan dan mengusahakan tersedianya keterangan yang belum ada atau masih berserakan di banyak tempat sehingga siap digunakan bila dibutuhkan.
b. Mencatat, yaitu membubuhkan dengan menggunakan berbagai alat tulis tentang keterangan yang ditujukan kepada public untuk dibaca, dikirim, atau disimpan.
c. Mengolah, yaitu mengerjakan keterangan-keterangan agar bisa disajikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat.
d. Menggandakan, yaitu memperbanyak data sesuai dengan kebutuhan..
e. Mengirim, yaitu dengan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat\ dari datu pihak ke pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyimpan, yaitu menaruh dokumen dan berkas ke tempat yang aman.[55]

Administrasi merupakan muara dan ujung dari pengelolaan lembaga. Aspek ini menentukan maju tidaknya lembaga ini. Tugas administrasi sama dengan tugas sekretaris, sebagai otak bagi organisasi, yang menggerakkan dan memonitoring seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilakukan sepanjang tahun.

Manajemen ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Untuk administrasi ini hendaknya harus dipegang oleh orang yang benar-benar berwatak aktif, kreatif, komunikatif, koordinatif, mempunyai kredibilitas, integritas, sekaligus akuntabilitas tinggi.

Administrasi diharapkan berjalan rapi, tertib, dan akuntabel. Madrasah berjalan dengan stabil dan dinamis.. dengan demikian madrasah akan meningkatkan prestasi terus menerus dan kondisi ini akan mampu menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan putra dan putrinya ke madrasah.[56]

6. Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen ini didasarkan pada kebutuhan, skala prioritas, perawatan, dan gradualitas. Madrasah denngan ketersediaan dana yang terbatas tentunya menuntut madrasah untuk cermat dalam melengkapi

[55] M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul*, … h. 91-92
[56] Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana prasarana yang sangat dibutuhkan secara mendesak serta kebutuhan yang tidak mendesak. Dengan demikian selalu ada skala prioritas yang harus ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan dan tuntutan *stakeholders*.

Manajemen ini terdiri atas lima hal meliputi: penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan dan pertanggungjawaban.

Staf manajemen sarana prasarana haruslah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai bangunan, harga, kualitas, dan kebutuhan lapangan. Perpustakaan, labolatorium, tempat pengembangan bakat, tempat ibadah, olahraga, rekreasi, koperasi, dan kantin madrasah adalah tugas dari staf sarana dan prasarana. Staf sapras harus proaktif mendorong stakeholders untuk berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan madrasah demi pengembangan pengetahuan dan bakat anak didik.[57]

7. **Manajemen Hubungan Kemasyarakatan**

Kemajuan madrasah juga ditentukan oleh masyarakat. Jika masyarakat menaruh kepercayaan besar, secara tidak langsung madrasah akan berkembang dengan progresif. Sebaliknya, jika madrasah apatis terhadap masyarakat ia akan mengalami krisis.

Beberapa tugas pokok bidang humas adalah:

[57] M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul*, … h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan informasi dan menaympaikan gagasan kepada masyarakat atau pihak lain yang menjadi sasaran.
b. Menjadi perantara pemimpin dalam bersosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak lain yang dibutuhkan.
c. Membantu pemimpin dalam mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang menarik pada saat tertentu.
d. Membantu pemimpin untuk mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat sebagai konsekwensi dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, untuk menumbuhkan harapan penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan orgaisasi.[58]

Humas harus dibangun dengan manajemen yang professional. Melaksanakan program berupa pengenalan visi, misi, tujuan, program, kegiatan, dan prestasi-prestasi yang dilahirkan madrasah. Menerbitkan buletin berisi informasi madrasah agar masyarakat mengetahui perkembangan yang terjadi di madrasah sebagai pertimbangan utama agar putra-putri mereka disekolahkan di madrasah.

8. Manajemen Kerjasama

Manajemen kerjasama sangat penting bagi pengembangan madrasah, pengembangan kualitas guru, peningkatan bakat anak didik,

[58] M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul*, … h. 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemantapan kepercayaan diri kepada masyarakat sebagai *stakeholders.*

Dalam manajemen inin kepala madrasah bertugas "membuka pintu", dan selanjutnya pihak yang menangani secara langsung dan mengembangkannya adalah staff bidang kerjasama. Bidang ini mampu dibagi menajdi beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan. Moisalnya bidang pendidikan, bidang bakat, kewirausahaan, media massa, budaya, politik, dan lain-lain. Pembagian ini memudahkan koordinasi dan dinamisasi.

Personel bidang ini haruslah seorang komunikator yang bisa menjelajah lintas bidang. Rajin dan aktif mendatangi banyak instansi baik swasta maupun pemerintah. Cerdas membuat proposal dan menyebarkan, pandai merawat kerjasama, menghindari segala tindakan yang dsestruktif dalam kerjasama, selalu tertantang untuk memasuki dunia baru yang belum pernah dimasuki. Sosok yang menyukai inovasi sepanjang waktu, sehingga tidak pernah merasa puas dengan hasil yang diraih.[59]

E. Indeks Integritas Ujian Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, salah satu pasalnya mengungkapkan bahwa, nilai akhir (NA) untuk penentuan kelulusan diperoleh dari gabungan nilai

[59] Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat melahirkan Madrasah Unggulan Merintis dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif*, …, h. 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN, yaitu dengan pembobotan 40% Nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% dari Nilai UN.[60]

Ujian Nasional digunakan untuk mengukur kompetensi siswa yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Hasil yang diperoleh diharapkan benar-benar mampu manggambarkan kemampuan siswa. Sehingga dapat membedakan siswa yang telah memenuhi dan tidak memenuhi standar kompetensi lulusan tersebut.[61]

Ada kalanya skor peserta didik tidak sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh permasalahan yang muncul dari peserta didik dan bisa juga diakibatkan oleh kualitas butir tes yang diberikan pada mereka. Ada peserta didik yang kesehariannya mempunyai prestasi belajar tergolong memadai ternyata memperoleh hasil pada Ujian Nasional yang rendah dan akhirnya tidak lulus. Sebaliknya peserta didik yang kesehariannya berprestasi rendah ternyata memperoleh hasil yang memuaskan pada Ujian Nasional.

Bisa juga terjadi siswa yang menempatkan jawaban pada nomor yang tidak tepat di lembar jawaban karena kehabisan waktu sehingga siswa tidak sempat memeriksa jawaban sehingga mendapat nilai yang rendah. Atau

[60]Dadan Rosana dan Sukardiyono, Analisis Butir Dan Identifikasi Ketidakwajaran Skor Ujian Akhir Sekolah Untuk Standarisasi Penilaian, (Jurnal Kependidikan, Volume 45, Nomor 2, November, 2015), h. 130-141.

[61]Mahyuddin Harahap, Pendeteksian Ketidak Wajaran (Inappropriatense) Skor Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Matematika SLTA se-Kota Medan Tahun 2006-2007, …, h. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin juga skor siswa yang di dapatkan lebih tinggi dari kemampuan dikarenakan mendapatkan jawaban dari orang lain.[62]

Ketidakwajaran skor yang menyebabkan rendahnya nilai integritas dapat terlihat dengan pola jawaban peserta ujian. Skor peserta ujian akan menjadi wajar apabila peserta tersebut dapat menjawab benar butir soal yang mudah dan menjawab salah butir soal yang sukar. Sebaliknya, skor peserta akan menjadi tidak wajar apabila peserta ujian menjawab salah soal yang mudah dan menjawab benar soal yang sulit.[63]

Kesalahan pengukuran yang diakibatkan peserta didik berikutnya terjadi ketika peserta didik mendapatkan skor lebih tinggi daripada kemampuan yang sebenarnya *(spuriously high).* Hal ini dapat terjadi ketika peserta didik mencontek atau memperoleh jawaban dari orang lain.[64]

Mereka akan memperoleh skor yang lebih tinggi dari kemampuan yang sebenarnya. mengemukakan bahwa pembahasan tentang ketidakwajaran pengukuran terbatas pada keanehan pola jawaban peserta tes (peserta didik) dalam tes. Bila pola jawaban yang dihasilkan peserta tes tidak normal.[65]

Misalnya, ada sejumlah jawaban benar terhadap butir-butir sulit pada seperdua tes yang pertama dan dan ada sejumlah jawaban salah terhadap

---

[62]Drasgow, F. Levine, M. V.m Mc Laughlin, M.E, Detecting Inappropriate Test Scores With Optimal And Practical Appropriateness Indices, Applied Psychological Measurement, 11. 1 (3. 1987), h. 59-79.

[63] Naga, D.S. 2001. "Indeks Kehati-hatian Skor Responden pada Model SHL: Suatu Bentuk Indeks Ketidakwajaran pada Skor Ujian". Jurnal Ilmiah Psikologi ”Arkhe”, 6. 1, (4. 2001), h. 43.

[64] Hulin, C.L, Drasgow, F., & Parsons, C.K. 1983. Item Response Theory: Application to Psychological Measurement. Homewood, IL: Dow JonesIrwin, h. 17.

[65] Hulin, C.L., Drasgow, F., & Parsons, C.K. 1983. Item Response Theory: Application to Psychological Measurement, … h. 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butir-butir tes yang mudah pada seperdua tes berikutnya. Atau peserta tes yang kreatif mungkin memberikan penafsiran yang berbeda terhadap butir tes yang mudah. Akibatnya, respon butir seperti ini tidak cocok dengan teori respon butir yang mengasumsikan peluang jawaban benar sebagai fungsi dari kecerdasan (kemampuan) peserta tes.

Pengukuran ketidakwajaran dapat pula bersumber dari kondisi penilaian. Nitko dan Wiersma & Jurs menyatakan tekanan mental peserta tes, seperti cemas, khawatir, takut gagal, kekurangmampuan dalam menulis, dapat menyebabkan peserta tes tidak berhasil menjawab secara benar butir-butir tes.[66] Sebagai akibatnya peserta didik seperti ini akan memperoleh skor yang tidak tepat, yakni tidak sesuai dengan kemampuan mereka sebenarnya.

Penyebab lain dari ketidakwajaran pengukuran adalah kecurangan saat pelaksanaan tes, misalnya ada peserta didik yang menyontek. Pola jawaban dari peserta didik yang curang dalam tes mungkin akan tampak ganjil. Kelompok jawaban benar akan bercampur dengan kelompok jawaban yang hampir semuanya tidak benar. Jenis pola jawaban seperti ini berbeda pada setiap peserta ujian. Keadaan ini dapat dideteksi melalui analisis pengukuran ketidakwajaran.

Ketidakwajaran merupakan ketidaksesuaian antara skor yang diperoleh peserta dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Untuk mengetahui kemampuan peserta yang sebenarnya, skor peserta bisa dikorelasikan dengan skor ujian standar yang sebenarnya. Sedang untuk

[66] Wiersma, W & Jurs, S. G, *Educational Measurement and Testing*, (2 ed.), (Boston: Allyn and Bacon, 1990), h. 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ketidak sesuaian skor peserta dapat digunakan pola jawaban peserta pada berbagai tingkat kesukaran butir soal.

Adanya ketidakwajaran dan praktik kecurangan yang terjadi saat berlangsungnya Ujian Nasional adalah bentuk ketidakjururan yang terjadi. Untuk mengatasi hal ini, kemendikbud membentuk adanya perangkat pengukuran indeks integritas Ujian Nasional (UN) berupa alat evaluasi pengukur intergitas untuk mengukur kecenderungan terjadinya kecurangan. IIUN dihadirkan oleh kemendikbud untuk mengukur tingkat kecurangan pelaksanaan UN yang dari tahun ke tahun selalu muncul. Kecurangan tersebut dapat dilakukan oleh pihak siswa, guru, sekolah maupun pihak lainnya.[67]

Indeks integritas UN merupakan tingkat prosentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan. Kecurangan yang diukur adalah pola gabungan persentase contek-mencontek antar siswa (kecurangan individu), dan persentase keseragaman pola jawaban UN (Kecurangan sistematik/terorganisir) dalam suatu sekolah.[68]

Kemendikbud memaparkan bahwa rentang angka indeks integritas adalah 0-100 di mana semakin tinggi nilai indeks integrtitasnya maka tingkat kecurangannya semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah nilai

[67] Faridah Alawiyah, Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan Ujian Nasional 2015), Aspirasi, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, 6. 2, (12. 2015), h. 194-195.

[68] Dokumen kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Paparan materi Pendidikan dan Kebudayaan, Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI 10 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integritas, maka semakin tinggi tingkat kecurangannya. Berikut gambaran matriks indek integritas UN:

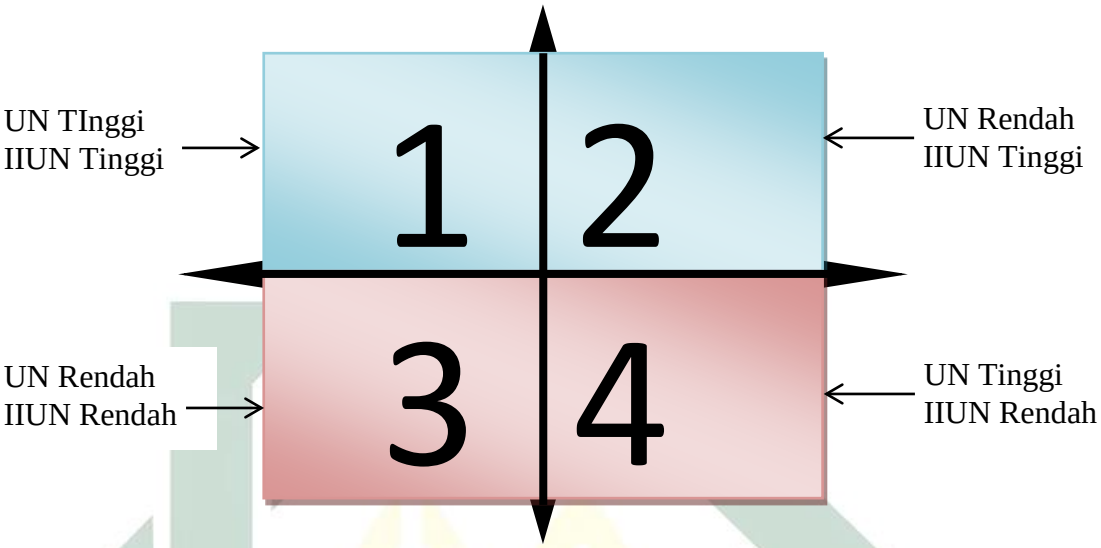

Gambar 2.1

Gambar tersebut menunjukkan matriks indeks integritas dengan rerata UN. Kuadran pertama menunjukkan angka UN tinggi dengan indeks integritas tinggi. Pada kuadran ini merupakan kuadran yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia, dimana tingkat kecurangan yang rendah dengan rerata hasil UN yang baik. Kuadran kedua menunjukkan posisi indeks integritas yang tinggi dengan angka rerata UN yang rendah. Kuadran tiga menunjukkan indeks integritas rendah dengan angka rerata UN yang rendah. Kuadran empat menunjukkan angka integritas rendah sementara rerata angka UN tinggi.

Matriks tersebut menunjukkan apabila hasil UN sebaran siswa maupun satuan pendidikan berada pada kuadran satu atau dua, maka tidak terjadi kecurangan saat pelaksanaan Ujian Nasional. Sebaliknya, jika matriks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaran siswa atau satuan pendidikan berada pada kuadran tiga atau empat, maka hal ini menunjukkan penyelenggaraan Ujian Nasional diwarnai dengan kecurangan.

Jika hal ini terjadi maka akan menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Karena pada kuadran empat tingkat kecurangan relatif tinggi dan angka yang dihasilkan dalam IIUN ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai bahan perbaikan untuk melakukan strategi lanjutan.[69]

[69] Faridah Alawiyah, Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan Ujian Nasional 2015), …, h. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id